



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA
UNIT KERJA : KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RUDIARTO SUMARWONO
2. Jabatan : ANGGOTA KASN
3. NHK : 757582

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 9.098.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 225 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.677.500.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 997.500.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 135 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 2.152.500.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 1.150.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 30 m2/30 m2 di KAB / KOTA KOTA DEPOK , HASIL SENDIRI Rp. 367.500.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/36 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 273.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 40 m2/40 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 472.500.000
8. Tanah Seluas 1000 m2 di KAB / KOTA TABANAN, HASIL SENDIRI Rp. 787.500.000
9. Tanah dan Bangunan Seluas 12 m2/12 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 307.500.000

1. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000



2. MOBIL, MERCEDEZ BENZ E-CLASS Tahun 2013, HASIL SENDIRI

Rp. 300.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 250.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 835.000.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. 15.000.000

Sub Total

Rp. 10.505.500.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 10.505.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.